

**PENGARUH INFORMASI SILPA APBD DAN ARUS KAS
TERHADAP PENGANGGARAN BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTA SE INDONESIA
BERDASARKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

Oleh : Elfreda Aplonia Lau¹ ; Muhammad Zamroni²

¹ Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : lauelfreda99@yahoo.com

=====

ABSTRACT

The aim of this research is to know and analysis the information of the budget rest, the activities of the cash flow operation, investment and the fund of the capital budget of the group of the local government related with the high of capacity. The result of it are (1) The rest of budget has the significant influence toward the capital budget of the local government (regency and multiple) which here high capacity (2) The cash flow of the investment and the budget find is the significant toward the capital find of the them (3) The rest fund and the cash flow of capital budget are not significant of the high capital capacity of the government concerned. (4) The cash flow activity influences significant toward the capital fund budget by the middle finance capacity.

Keyword : rest, cash flow, investment, budget, fund, capacity, ideal, government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh informasi SiLPA APBD, Arus Kas Aktivitas operasi, Investasi, dan Pembiayaan/pendanaan terhadap penganggaran belanja modal pada kelompok pemerintah kabupaten/kota dengan kemampuan keuangan tinggi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui an menganalisis pengaruh informasi SiLPA APBD, Arus Kas Aktivitas Operasi, Arus Kas Investasi dan Arus Kas Pendanaan Terhadap penganggaran belanja modal pada kelompok pemerintah kabupaten/ kota dengan kemampuan keuangan sedang.

Permasalahan penelitian ini dinyatakan dalam research Question sebagai berikut : Apakah informasi SiLPA APBD, Arus Kas Aktivitas Operasi, Arus Kas Investasi dan Arus Kas Pembiayaan/Pendanaan

berpengaruh signifikan terhadap penganggaran belanja modal pada kelompok pemerintah kabupaten/kota dengan kemampuan keuangan tinggi maupun kemampuan keuangan sedang?

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntansi Sektor Publik yang berfokus pada SiLPA APBD, Laporan Arus Kas, Penganggaran Belanja Modal. Hipotesis penelitian ini yaitu Informasi SiLPA APBD, Arus Kas Aktivitas Operasi dan Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan/Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota dengan kemampuan keuangan tinggi maupun kemampuan keuangan sedang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, SiLPA APBD dan Arus Kas Operasi Ar berpengaruh signifikan terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota dengan kemampuan keuangan tinggi. Kedua, Arus Kas Investasi dan Arus Kas Pendanaan/Pembiayaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota dengan kemampuan keuangan tinggi. Ketiga SiLPA APBD dan Arus Kas Aktivitas Investasi dan Arus Kas Pembiayaan/Pendanaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota dengan kemampuan keuangan sedang. Keempat, Arus Kas Aktivitas Operasi berpengaruh signifikan terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota dengan kemampuan keuangan sedang.

Kata Kunci :SiLPA APBD, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pembiayaan/Pendanaan, Penganggaran Belanja Modal, Kemampuan Keuangan Daerah

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penelitian ini sudah dilakukan oleh Haryanto (2013) dengan judul pengaruh informasi SiLPA APBD dan Arus Kas terhadap Penganggaran Belanja Modal berdasarkan klasifikasi Pemerintah Daerah menurut Permendagri Nomor 21. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Informasi SiLPA APBD dan Arus Kas Investasi berpengaruh terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster a dan klaster c. Sedangkan pada pemerintah daerah klaster b tidak berpengaruh. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Muammar(2014) dengan judul penelitian Pengaruh Informasi SiLPA APBD dan Arus Kas terhadap Penganggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Di Indonesia berdasarkan Klaster Permendagri Nomor 21 Tahun 2007. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada pemerintah kabupaten klaster b, semua variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap penganggaran belanja modal. Namun pada pemerintah kabupaten klaster c Informasi SiLPA APBD dan Arus Kas berpengaruh tidak signifikan terhadap penganggaran belanja modal.

Temuan hasil penelitian Haryanto (2013) dan Muammar Fauzi (2014) terdapat kontradiksi yakni menurut Heryanto Informasi SiLPA APBD dan Arus Kas Investasi berpengaruh signifikan terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster a dan klaster c sedangkan temuan Muammar(2014) Informasi SiLPA APBD dan Arus Kas Investasi berpengaruh terhadap penganggaran belanja modal hanya pada pemerintah daerah klaster b, sedangkan klaster a dan c Informasi SiLPA APBD dan Arus Kas Investasi berpengaruh tidak signifikan. Kontradiksi yang kedua, temuan Heryanto (2013) menunjukkan bahwa Informasi SiLPA APBD dan Arus Kas Investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster b, sementara temuan Muammar (2014) menunjukkan bahwa bahwa Informasi SiLPA APBD dan Arus Kas Investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster b.

Kontradiksi temuan tersebut terjadi antara dua peneliti dengan variabel penelitian yang sama pada lingkup penelitian yang sama dalam kurun waktu 1 tahun penelitian yaitu tahun 2013 ke tahun 2014, waktu yang relative singkat mengundang pertanyaan faktor penyebab terjadinya perbedaan tersebut. Kontradiksi temuan tersebut menggelitik untuk diteliti kembali dengan dasar pertimbangan bahwa tenggang waktu 2014 ke 2017 tiga tahun lamanya, dengan menggunakan variabel penelitian yang sama lingkup penelitian yang sama memberikan hasil yang berbeda ataukah sebaliknya memperkuat temuan penelitian Haryanto(2013) ataukah temuan Muammar(2014).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang penelitian, maka permasalahan penelitian ini dapat dinyatakan dalam pertanyaan penelitian berikut :

1. Apakah informasi SiLPA APBD berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan tinggi ?
2. Apakah Arus Kas Aktivitas Operasi berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan tinggi ?
3. Apakah Arus Kas Investasi berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan tinggi?
4. Apakah Arus Kas Pendanaan/Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan tinggi ?
5. Apakah informasi SiLPA APBD berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan sedang?
6. Apakah Arus Kas Aktivitas Operasi berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan sedang ?
7. Apakah Arus Kas Investasi berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan sedang ?
8. Apakah Arus Kas Pendanaan/Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan sedang ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh informasi SiLPA APBD terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan tinggi
2. Pengaruh Arus Kas Aktivitas Operasi terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan tinggi
3. Pengaruh Arus Kas Investasi terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan tinggi

4. Pengaruh Arus Kas Pendanaan/Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan tinggi
5. Pengaruh informasi SiLPA APBD terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan sedang
6. Pengaruh Arus Kas Aktivitas Operasi terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan sedang
7. Pengaruh informasi Arus Kas Investasi terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan sedang
8. Pengaruh Arus Kas Pendanaan/Pembiayaan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan sedang

II. KERANGKA DASAR TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Dasar Teori

Government Accounting Standards Board (GASB) dalam Bastian (2006:164) memberikan definisi tentang anggaran pada sektor publik sebagai rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu.

Belanja modal oleh Sularso dan Restianto (2011:112) diartikan sebagai pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin. Selanjutnya Sularso dan Restianto (2011:113) mengklasifikasi belanja modal menjadi belanja publik dan belanja aparatur. Belanja publik yaitu belanja modal yang manfaatnya dapat langsung dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan belanja aparatur merupakan belanja modal yang manfaatnya tidak langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur negara.

SiLPA APBD oleh Siregar(2015:199) diartikan dengan selisih lebih pembiayaan anggaran yaitu selisih lebih antara realisasi penerimaan dengan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SiLPA APBD merupakan bagian dari laporan realisasi yang dilaporkan oleh pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan

Informasi arus kas aktivitas operasi oleh Reeve (2012:731) didefinisikan sebagai arus kas dari transaksi yang dipengaruhi oleh pendapatan/penerimaan dan pengeluaran pembiayaan suatu

entitas. Berdasarkan Pernyataan No.03 SAP penerimaan pemerintah yang dilaporkan sebagai arus kas masuk dari aktivitas operasi terdiri dari: penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNPB), penerimaan hibah, penerimaan laba perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya, penerimaan lain-lain/penerimaan dari pendapatan luar biasa dan penerimaan transfer. Selanjutnya yang termasuk sebagai pengeluaran pemerintah yaitu pembayaran pegawai, pembayaran barang, pembayaran bunga, pembayaran subsidi, pembayaran hibah, pembayaran bantuan social, pembayaran lain-lain/kejadian luar biasa dan pembayaran transfer.

Informasi arus kas investasi menurut Noordiawan (2007:167) merupakan arus kas berdasarkan investasi asset non keuangan mencerminkan arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Berdasarkan PSAP no.03 sumber-sumber penerimaan pemerintah yang termasuk kedalam arus kas masuk dari aktivitas investasi adalah: penjualan asset tetap, penjualan asset lainnya, pencairan dana cadangan, penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi dalam bentuk sekuritas. Sedangkan pengeluaran pemerintah yang dapat digolongkan sebagai arus kas keluar dari aktivitas investasi berupa : perolehan asset tetap, perolehan asset lainnya, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah dan pembelian investasi dalam bentuk sekuritas.

Informasi arus kas pembiayaan didefinisikan oleh Noordiawan (2001:169) sebagai arus kas berdasarkan pembiayaan mencerminkan arus kas yang berhubungan dengan pendanaan deficit atau penggunaan surplus anggaran. Pada PSAP No. 03 tercantum sumber-sumber penerimaan pemerintah yang termasuk arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan meliputi: penerimaan utang luar negeri, penerimaan dari utang obligasi, penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah, kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Jenis aktivitas pengeluaran yang merupakan bagian arus kas keluar dari aktivitas pendanaan berdasarkan PSAP No.03 antara lain: pembayaran pokok utang luar negeri, pembayaran pokok utang obligasi, pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah dan pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.

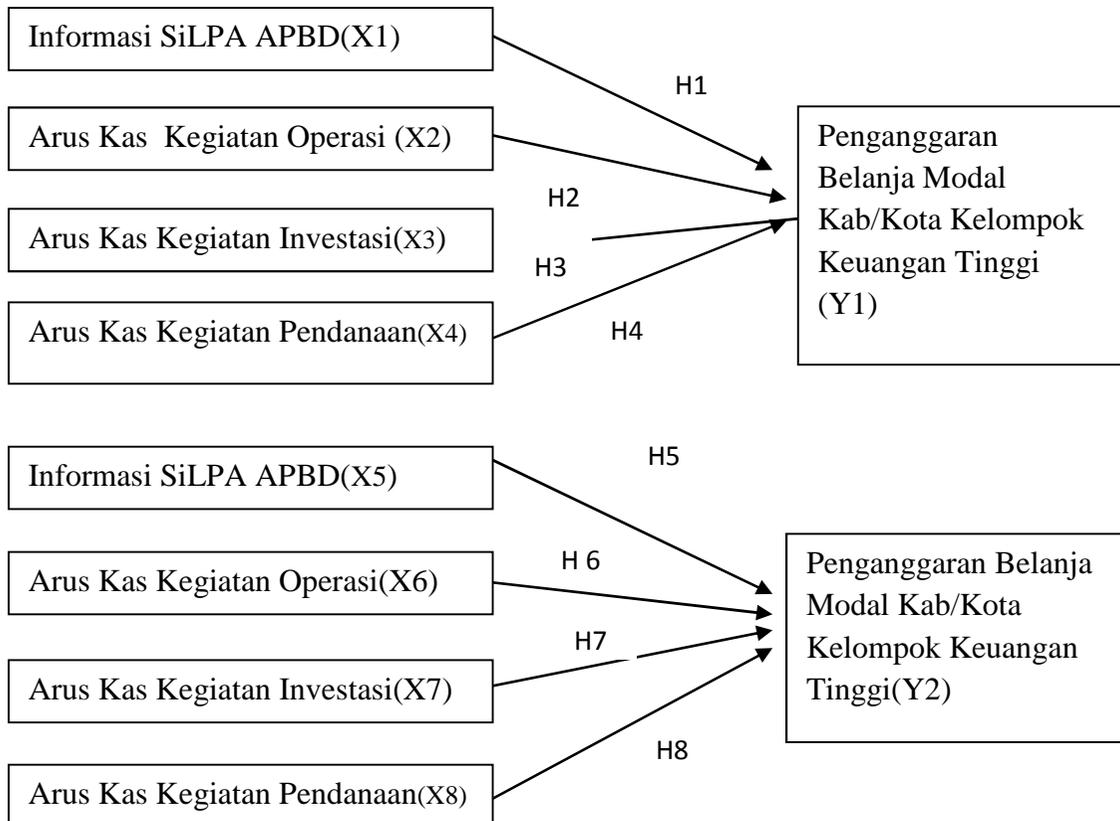
Kemampuan keuangan daerah termaktup dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 dan dinyatakan sebagai klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula pendapatan umum daerah dikurangi belanja pegawai. Pengelompokan keuangan daerah untuk kabupaten/kota menjadi tiga kategori yaitu :

1. Di atas Rp 400.000.000,00(empat ratus milyar rupiah) dikempokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi

2. Antara Rp 200.000.000,00(dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 400.000.000,00(empat ratus milyar rupiah) dikempokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi
3. Di bawah Rp 200.000.000,00(dua ratus milyar rupiah) dikempokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah

B. Kerangka Konsep

Berdasarkan teori yang berkaitan dengan Informasi SiLPA, Arus Kas Kegiatan Operasi, Arus Kas Kegiatan Investasi dan Arus Kas Kegiatan Pendanaan, Penganggaran Belanja Modal dan Kemampuan Keuangan, maka kerangka koseptual penelitian pada gambar berikut :



Gambar 1. Kerangka Konsep

C. Hipotesis

Merujuk pada *research question*, dasar teori, maka hipotesis penelitian ini adalah :

dapat dinyatakan dalam pertanyaan penelitian berikut :

1. Informasi SiLPA APBD berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan tinggi
2. Arus Kas Aktivitas Operasi berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan tinggi
3. Arus Kas Investasi berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan tinggi
4. Arus Kas Pendanaan/Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan tinggi
5. Informasi SiLPA APBD berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan sedang
6. Arus Kas Aktivitas Operasi berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan sedang
7. Arus Kas Investasi berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan sedang
8. Arus Kas Pendanaan/Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan sedang

III.METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional dan Pengukuran

Penelitian ini didesain untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Informasi SiLPA APBD, arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan/pembiayaan terhadap Penganggaran belanja modal kabupaten/kota dengan kemampuan tinggi maupun kemampuan sedang.

SiLPA APBD merupakan selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Indonesia selama satu periode. SiLPA APBD merupakan bagian dari laporan realisasi anggaran yang dilaporkan oleh pemerintah kabupaten/kota pada tahun anggaran bersangkutan.

Arus kas kegiatan operasi merupakan arus kas dari transaksi yang dipengaruhi oleh pendapatan/penerimaan dan pengeluaran/pembiayaan pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Arus kas kegiatan investasi merupakan arus kas berdasarkan investasi asset non keuangan yang mencerminkan arus kas dari perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas pembiayaan merupakan arus kas yang berhubungan dengan pendanaan deficit atau penggunaan surplus anggaran pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Penganggaran belanja modal merupakan rencana operasi keuangan untuk membiayai pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menentukan asset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin.

Kelompok keuangan tinggi merupakan klasifikasi kemampuan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan formulasi pendapatan umum daerah dikurangi belanja pegawai menghasilkan nilai diatas Rp 400.000.000.000,00(empat ratus milyar rupiah).

Kelompok keuangan sedang merupakan klasifikasi kemampuan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan formulasi pendapatan umum daerah dikurangi belanja pegawai menghasilkan nilai antara Rp 200.000.000.000,00(dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 400.000.000.000,00(empat ratus milyar rupiah).

B. Jenis data dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data pembentukan daerah otonom di Indonesia, laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten/kota TA 2014, laporan arus kas pemerintah kabupaten kota TA 2014, Anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kabupaten/kota TA 2015. Data pada penelitian ini diperoleh dari Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) BPK RI Tahun 2016 dan Dirjen Otda Kemendagri.

C. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah daerah otonom yang berbentuk pemerintah kabupaten dan kotamadya dengan klasifikasi kelompok keuangan tinggi dan sedang. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Dalam Negeri per 31 Desember 2014 populasi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan kelompok keuangan tinggi dan sedang berjumlah 498 terdiri dari 344 kabupaten/kota kelompok keuangan tinggi dan 154 kabupaten/kota kelompok keuangan sedang.

Sampel penelitian ditentukan berdasarkan rumus Slovin: $\frac{N}{1+(Nxe^2)}$

dimana :

N = jumlah populasi, n = jumlah sampel, e = Batas toleransi kesalahan. Pada penelitian ini populasi sebanyak 498, tingkat kesalahan yang ditoleransi 1 %, maka sampel penelitian ini ditentukan sebesar $\frac{498}{1+(498 \times 0,01 \times 0,01)} = 474 \text{ kota/kabupaten}$ yang kemudian dipilih sebagai berikut : Kelompok keuangan tinggi = $344/498 \times 474 = 330$ sedangkan kelompok keuangan sedang = $154/498 \times 474 = 144$ kabupaten/kota.

D. Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini dihimpun dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu pengumpulan data-data dan informasi dari Laporan Realisasi Anggaran TA 2014, Laporan Arus Kas TA 2014, APBD TA 2015 dan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Metode Analisis

Data-data yang dihimpun dianalisis dengan menggunakan metode Regresi Linier Berganda (*Multiple Linier Regression*) dengan rumus:

$$Y_1 = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y_2 = b_0 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + b_8X_8 + e$$

Dimana :

Y_1 : Penganggaran belanja modal pemerintah kabupaten/kota kelompok keuangan tinggi

Y_2 : Penganggaran belanja modal pemerintah kabupaten/kota kelompok keuangan sedang

X_1 : SiLPA APBD pemerintah kabupaten/kota kelompok keuangan tinggi

X_2 : Arus kas dari aktivitas operasi pemerintah kabupaten/kota kelompok keuangan tinggi

X_3 : Arus kas dari aktivitas investasi pemerintah kabupaten/kota kelompok keuangan tinggi

X_4 : Arus kas dari aktivitas pendanaan pemerintah kabupaten/kota kelompok keuangan tinggi

X_5 : SiLPA APBD pemerintah kabupaten/kota kelompok keuangan sedang

X_6 : Arus kas dari aktivitas operasi pemerintah kabupaten/kota kelompok keuangan sedang

X_7 : Arus kas dari aktivitas investasi pemerintah kabupaten/kota kelompok keuangan sedang

X_8 : Arus kas dari aktivitas pendanaan pemerintah kabupaten/kota kelompok keuangan sedang

O : koefisien kostanta

- b1,b2,b3,b4 : koefisien variabel independen pada pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan tinggi
b5,b6,b7,b8 : koefisien variabel independen pada pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan sedang

Penggunaan analisis regresi menuntut dilakukannya uji linieritas dan uji asumsi klasik yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uji linieritas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui spesifikasi model yang digunakan linier atau tidak (Wiratna Sujarweni,2014: 56). Ramsey menyarankan *general test of specification* atau RESET. Melalui uji ini dapat diketahui spesifikasi model yang digunakan benar bentuk linier atau tidak. Spesifikasi model dikatakan linier bila nilai Fhitung lebih kecil dari nilai Ftabel dan sebaliknya spesifikasi model dikatakan tidak linier jika nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel.

Uji Asumsi Klasik

Penggunaan analisis regresi wajib memenuhi syarat asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Ghozali dan Fuad(2008) berpendapat bahwa asumsi yang paling fundamental dalam analisis multivariate adalah normalitas disamping multikolinieritas dan ditambahkan linieritas serta autokorelasi oleh Olobatuy(2006). Namun Abrams(2010) menegaskan bahwa autokorelasi dapat diabaikan jika data yang digunakan merupakan data *cross section*.

Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui data terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang terdistribusi normal. Normalitas diuji dengan kolmogorov-Smirnov.

Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2012:105) uji multikolinieritas dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas multikolinieritas yang dapat dideteksi dari nilai Tolerance yang berada diatas 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor(VIF) berada dibawah angka 10.

Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2012:139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi terjadi kesamaan residual dari pengamatan satu ke pengamatan

yang lain. Pada penelitian ini dideteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas melalui uji Glejser yakni meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel bebasnya. Jika variabel bebasnya tidak signifikan (nilai sig > 0,05) maka disimpulkan model ini bebas dari heteroskedastisitas.

Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi bahwa nilai variabel dependen tidak berkorelasi dengan variabel dependen itu sendiri. Pada penelitian ini tidak dilakukan uji autokorelasi karena data yang digunakan adalah data *cross section*.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi syarat asumsi klasik yaitu data terdistribusi secara normal, bebas dari multikolinieritas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa Informasi SiLPA, Arus Kas dari Kegiatan Operasi, Arus Kas dari Kegiatan Investasi dan Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan/Pembiayaan, penganggaran belanja modal pemerintah kabupaten/kota dengan kemampuan keuangan daerah tinggi memiliki nilai Asymp. Sig sebesar 0,186 lebih besar dari 0,05, sehingga dikatakan bahwa data yang digunakan terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut semua variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria normalitas pada uji asumsi klasik sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas Model Pemerintah Kabupaten/Kota Kelompok
Keuangan Tinggi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		330
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.03810274E2
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.053
	Negative	-.060
Kolmogorov-Smirnov Z		1.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.186

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber: Data Diolah, 2017

Uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa Informasi SiLPA, Arus Kas dari Kegiatan Operasi, Arus Kas dari Kegiatan Investasi dan Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan/Pembiayaan dan penganggaran belanja daerah pemerintah kabupaten/kota dengan kelompok keuangan daerah sedang memiliki nilai Asymp.Sig sebesar 0,060 lebih besar dari 0,05, sebagaimana tertera pada tabel 2. Hasil uji normalitas tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan terdistribusi normal.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Model Pemerintah Kabupaten/Kota Kelompok
Keuangan Tinggi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		144
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	50.59636235
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.110
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		1.323
Asymp. Sig. (2-tailed)		.060

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber : Data Diolah, 2017

Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Deteksi multikolinieritas dapat diketahui dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF dibawah 10 untuk semua variabel independen, maka model regresi yang digunakan bebas dari multikolinieritas.

Brdasarkan uji multikolinieritas pada tabel 3 dan 4, diketahui bahwa nilai VIF untuk setiap variabel independen berada dibawah nilai 10 dan nilai tolerance berada diatas 0,10. Hasil uji ini menunjukkan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas Pemerintah Kabupaten/kota kelompok
Keuangan Tinggi
Coefficients^a

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
21.753	10.891		1.997	.047		
.288	.040	.203	7.207	.000	.428	2.338
1.098	.068	.845	16.189	.000	.124	8.063
.103	.068	.070	1.517	.130	.159	6.272
.490	.264	.034	1.859	.064	.995	1.005

a. Dependent Variable: Anggaran Belanja Modal (Tinggi) (Y1)

Sumber : Data Diolah,2017

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas Pemerintah Kabupaten/kota kelompok
Keuangan Tinggi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	86.087	22.357		3.851	.000		
SILPA (Sedang) (X5)	.032	.121	.024	.266	.791	.661	1.514
Arus Kas Aktivitas Operasi (Sedang) (X6)	.825	.229	.491	3.612	.000	.297	3.372
Arus Kas Aktivitas Investasi (Sedang) (X7)	.010	.213	.006	.046	.964	.293	3.414
Arus Kas Aktivitas Pembiayaan (Sedang) (X8)	.248	.668	.028	.370	.712	.931	1.074

a. Dependent Variable: Anggaran Belanja Modal (Sedang) (Y2)

Sumber : Data Diolah,2017

Heteroskedastisitas

Cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melakukan uji glejser yaitu dengan meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel bebasnya. Apabila terdapat variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap nilai absolute residual maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji glejser pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikansi terhadap absolute residual dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Hal ini pertanda bahwa model regresi yang digunakan bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas Pemerintah Kabupaten/kota kelompok
Keuangan Tinggi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	39.359	6.863		5.735	.000
SILPA (Tinggi) (X1)	.034	.025	.108	1.360	.175
Arus Kas Aktivitas Operasi (Tinggi) (X2)	.024	.043	.084	.568	.570
Arus Kas Aktivitas Investasi (Tinggi) (X3)	-.062	.043	-.189	-1.452	.147
Arus Kas Aktivitas Pembiayaan (Tinggi) (X4)	-.115	.166	-.036	-.691	.490

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber : Data Diolah,2017

Hasil uji glejser pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi terhadap nilai absolute residual dari masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,05. Hal ini pertanda bahwa model regresi yang digunakan bebas dari heteroskedastisitas

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas Pemerintah Kabupaten/kota kelompok
Keuangan Sedang

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	36.738	12.720		2.888	.004
SILPA (Sedang) (X5)	-.029	.069	-.043	-.423	.673
Arus Kas Aktivitas Operasi (Sedang) (X6)	.224	.130	.259	1.723	.087

Arus Kas Aktivitas Investasi (Sedang) (X7)	.239	.121	.297	1.968	.051
Arus Kas Aktivitas Pembiayaan (Sedang) (X8)	-.714	.380	-.159	-1.878	.062

a. Dependent Variable: ABS_RESI

Sumber : Data Diolah,2017

Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda untuk pemerintah kabupaten/kota kelompok keuangan tinggi adalah : $Y1 = 21,753 + 0,288X1 + 1,098X2 + 0,103 X3 + 0,490 X4$

Tabel 7

Hasil Uji Parsial(Uji t) Model Regresi Linier Berganda Pemerintah Kabupaten/Kota Kelompok Keuangan Tinggi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.753	10.891		1.997	.047
SILPA (Tinggi) (X1)	.288	.040	.203	7.207	.000
Arus Kas Aktivitas Operasi (Tinggi) (X2)	1.098	.068	.845	16.189	.000
Arus Kas Aktivitas Investasi (Tinggi) (X3)	.103	.068	.070	1.517	.130
Arus Kas Aktivitas Pembiayaan (Tinggi) (X4)	.490	.264	.034	1.859	.064

a. Dependent Variable: PBM_tinggi (Y1)

Sumber : Data Diolah,2017

Model regresi tersebut memperlihatkan bahwa :

1. Nilai konstanta positif yang berarti bahwa penganggaran belanja modal bagi pemerintah kabupaten/kota tetap ada atau tersedia, meskipun tanpa SiLPA, Arus kas kegiatan operasi, arus kas kegiatan investasi dan arus kas kegiatan pendanaan/pembiayaan.
2. Nilai koefisien variabel SiLPA positif dan signifikan menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap penganggaran belanja modal pemerintah kabupaten/kota dengan kemampuan keuangan tinggi
3. Nilai koefisien variabel Arus Kas Kegiatan Operasi positif dan signifikan menunjukkan bahwa Arus Kas Kegiatan Operasi berpengaruh positif signifikan terhadap penganggaran belanja modal

- pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan tinggi
4. Nilai koefisien variabel Arus Kas Kegiatan Investasi positif tetapi tidak signifikan menunjukkan bahwa Arus Kas Kegiatan Investasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penganggaran belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan kemampuan keuangan tinggi
 5. Nilai koefisien variabel Arus Kas Kegiatan Pembiayaan/Pendanaan positif dan signifikan tetapi tidak signifikan menunjukkan bahwa Arus Kas Kegiatan Nilai koefisien variabel Arus Kas Kegiatan Investasi positif tetapi tidak signifikan menunjukkan bahwa Arus Kas Kegiatan Investasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penganggaran belanja modal pemerintah kabupaten/kota se Indonesia kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi

Tabel 8
Hasil Uji F Model Regresi Linier Berganda Pemerintah Kabupaten/Kota
Kelompok Keuangan Daerah Tinggi

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.875E7	4	7186441.709	658.750	.000 ^a
	Residual	3545492.547	325	10909.208		
	Total	3.229E7	329			

a. Predictors: (Constant), Arus Kas Aktivitas Pembiayaan (Tinggi) (X4), SiLPA (Tinggi) (X1), Arus Kas Aktivitas Investasi (Tinggi) (X3), Arus Kas Aktivitas Operasi (Tinggi) (X2)

b. Dependent Variable: Anggaran Belanja Modal (Tinggi) (Y1)

Hasil uji F menunjukkan bahwa informasi SiLPA, Arus Kas Kegiatan Operasi, Arus Kas Kegiatan Investasi, Arus Kas Kegiatan Pembelian/Pendanaan berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota se Indonesia kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

Tabel 9

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.944 ^a	.890	.889	104.44715

Secara keseluruhan model regresi menunjukkan nilai regresi sebesar 0,89 atau 89% yang menunjukkan bahwa informasi SiLPA, Arus Kas Kegiatan Operasi, Arus Kas Kegiatan Investasi, Arus Kas Kegiatan Pembiayaan/Pendanaan mempengaruhi Penganggaran belanja modal pemerintahan kabupaten/kota kelompok kemampuan keuangan daerah

tinggi sebesar 89% sedangkan sisanya sebesar 11% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Model regresi linier berganda untuk pemerintah kabupaten/kota kelompok keuangan sedang adalah : $Y_2 = 86,087 + 0,032X_5 + 0,825X_6 + 0,01 X_7 + 0,248 X_8$

Tabel 10
Hasil Uji Parsial(Uji t) Model Regresi Linier Berganda
Pemerintah Kabupaten/Kota Kelompok Keuangan Sengah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	86.087	22.357		3.851	.000
SILPA (Sengah) (X5)	.032	.121	.024	.266	.791
Arus Kas Aktivitas Operasi (Sengah) (X6)	.825	.229	.491	3.612	.000
Arus Kas Aktivitas Investasi (Sengah) (X7)	.010	.213	.006	.046	.964
Arus Kas Aktivitas Pembiayaan (Sengah) (X8)	.248	.668	.028	.370	.712

a. Dependent Variable: PBM_Sengah (Y2)

Sumber : Data Diolah,2018

Model regresi tersebut memperlihatkan bahwa :

1. Nilai konstanta positif yang berarti bahwa penganggaran belanja modal bagi pemerintah kabupaten/kota tetap ada atau tersedia, meskipun tanpa SiLPA, Arus kas kegiatan operasi, arus kas kegiatan investasi dan arus kas kegiatan pendanaan/pembiayaan.
2. Nilai koefisien variabel SiLPA positif tetapi tidak signifikan menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penganggaran belanja modal pemerintah kabupaten/kota se Indonesia kelompok kemampuan keuangan daerah sedang
3. Nilai koefisien variabel Arus Kas Kegiatan Operasi positif dan signifikan menunjukkan bahwa Arus Kas Kegiatan Operasi berpengaruh positif signifikan terhadap penganggaran belanja modal pemerintah kabupaten/kota se Indonesia dengan kelompok kemampuan keuangan daerah sedang
4. Nilai koefisien variabel Arus Kas Kegiatan Investasi positif tetapi tidak signifikan menunjukkan bahwa Arus Kas Kegiatan Investasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penganggaran belanja

modal pemerintah kabupaten/kota se Indonesia kelompok kemampuan keuangan daerah sedang

5. Nilai koefisien variabel Arus Kas Kegiatan Pembiayaan/Pendanaan positif tetapi tidak signifikan menunjukkan bahwa Arus Kas kegiatan pendanaan/pembiayaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penganggaran belanja modal pemerintah kabupaten/kota se Indonesia kelompok kemampuan keuangan daerah sedang

Tabel 11

Hasil Uji F Model Regresi Linier Berganda Pemerintah Kabupaten/Kota Kelompok Keunagan Daerah Sedang

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	115082.365	4	28770.591	10.924	.000 ^a
	Residual	366078.839	139	2633.661		
	Total	481161.205	143			

a. Predictors: (Constant), Arus Kas Aktivitas Pembiayaan (Sedang) (X8), SILPA (Sedang) (X5), Arus Kas Aktivitas Operasi (Sedang) (X6), Arus Kas Aktivitas Investasi (Sedang) (X7)

b. Dependent Variable: Anggaran Belanja Modal (Sedang) (Y2)

Sumber : Data Diolah, 2018

Hasil uji F menunjukkan bahwa informasi SiLPA, Arus Kas Kegiatan Operasi, Arus Kas Kegiatan Investasi, Arus Kas Kegiatan Pembelanjaan/Pendanaan berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pemerintah kabupaten/kota se Indonesia kelompok kemampuan keuangan daerah sedang.

Tabel 12

Hasil Uji F Model Regresi Linier Berganda Pemerintah Kabupaten/Kota Kelompok Keunagan Daerah Sedang

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.489 ^a	.239	.217	51.31920

a. Predictors: (Constant), Arus Kas Aktivitas Pembiayaan (Sedang) (X8), SILPA (Sedang) (X5), Arus Kas Aktivitas Operasi (Sedang) (X6), Arus Kas Aktivitas Investasi (Sedang) (X7)

b. Dependent Variable: Anggaran Belanja Modal (Sedang) (Y2)

Sumber : Data Diolah, 2018

Secara keseluruhan model regresi menunjukkan nilai regresi sebesar 0,239 atau 23,9% yang menunjukkan bahwa informasi SiLPA, Arus Kas Kegiatan Operasi, Arus Kas Kegiatan Investasi, Arus Kas Kegiatan Pembiayaan/Pendanaan mempengaruhi Penganggaran belanja modal

pemerintahan kabupaten/kota se Indonesia kelompok kemampuan keuangan daerah sedang sebesar 23,9% sedangkan sisanya sebesar 76,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dijelaskan hal-hal berikut :

1. Pengaruh Informasi SiLPA terhadap Penganggaran Belanja Modal

Informasi SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap penganggaran belanja modal pemerintah kabupaten/kota se Indonesia pada kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi berarti semakin besar Selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah kabupaten/kota se Indonesia maka semakin tinggi pula penganggaran belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 1 penelitian diterima. Temuan ini mendukung hasil penelitian Haryanto(2013) dan Muammar(2014).

Bagi pemerintah kabupaten/kota dengan kemampuan keuangan sedang, SiLPA berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penganggaran belanja modal. Temuan ini menunjukkan bahwa kenaikan SiLPA tidak diikuti dengan kenaikan penganggaran belanja modal pemerintah kabupaten/kota se Indonesia yang berkemampuan keuangan daerah sedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ke 5 dari penelitian ini tidak didukung Temuan ini mendukung hasil penelitian Haryanto(2013) bahwa semakin besar Selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah kabupaten/kota se Indonesia dengan kemampuan keuangan sedang tidak disertai dengan peningkatan penganggaran belanja modal yang berarti. Namun temuan ini tidak mendukung hasil penelitian Muammar(2014) bahwa. Bagi pemerintah kabupaten/kota dengan kemampuan keuangan sedang, SiLPA berpengaruh positif signifikan. Hal ini dikarenakan alokasi SILPA lebih diutamakan untuk membiayai deficit realisasi anggaran tahun berikutnya. Tetapi sebagian atau seluruh SILPA lebih diprioritaskan untuk belanja pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau digunakan untuk pemakaian jasa dalam program dan kegiatan pemerintah daerah.

2. Pengaruh Arus Kas dari Aktivitas Operasi terhadap Penganggaran Belanja Modal

Arus Kas Kegiatan Operasi berpengaruh positif signifikan terhadap penganggaran belanja modal pemerintah kabupaten/kota se Indonesia dengan kemampuan keuangan daerah tinggi. Hal ini berarti semakin tinggi nilai arus kas operasi maka semakin besar penganggaran belanja modal pada tahun anggaran berikutnya. Temuan ini mendukung hipotesis penelitian ke 2 sekaligus mendukung hasil penelitian Muammar(2014:53).

Arus Kas Kegiatan Operasi berpengaruh positif signifikan terhadap penganggaran belanja modal pemerintah kabupaten/kota se Indonesia dengan kemampuan keuangan sedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi arus kas kegiatan operasi maka semakin besar pula penganggaran belanja modal di tahun anggaran berikutnya. Temuan ini menerima hipotesis penelitian ke 6 serta mendukung temuan Muammar(2014:53).

3. Pengaruh Arus Kas dari Aktivitas Investasi terhadap Penganggaran Belanja Modal

Arus Kas Kegiatan Investasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penganggaran belanja modal pemerintah kabupaten/kota se Indonesia pada kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi maupun pada kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, sehingga hipotesis 3 dan hipotesis 7 penelitian ini diterima. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan pemerintah daerah menyajikan arus kas investasi yang bernilai negatif yang pertanda bahwa pemerintah kabupaten/kota dalam tahap meningkatkan nilai investasi daerah dan nilai aset daerah. Pemerintah kabupaten/kota belum menggunakan pelepasan aset sebagai sumber pendanaan dalam penganggaran belanja modal.

4. Pengaruh Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan terhadap Penganggaran Belanja Modal

Arus kas pembiayaan/pendanaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota se Indonesia dengan kelompok keuangan daerah tinggi . Temuan ini tidak mendukung temuan Haryanto(2015) maupun temuan Muammar(2014).

Arus kas pembiayaan/pendanaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota se Indonesia dengan kelompok keuangan daerah sedang . Temuan ini mendukung temuan Haryanto(2015),namun tidak mendukung hasil penelitian Muammar(2014).

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan disimpulkan bahwa :

1. Informasi SiLPA APBD berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota se Indonesia dengan kemampuan keuangan tinggi . Dengan demikian hipotesis 1 penelitian ini diterima.
2. Arus Kas Aktivitas Operasi berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota se Indonesia kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi, sehingga hipotesis penelitian 2 diterima.

3. Arus Kas Investasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota se Indonesia dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, maka hipotesis penelitian ini ditolak
4. Arus Kas Pendanaan/Pembiayaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota se Indonesia kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi. Hasil penelitian ini menolak hipotesis
5. Informasi SiLPA APBD berpengaruh tidak signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota se Indonesia kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, sehingga hipotesis penelitian ini ditolak.
6. Arus Kas Aktivitas Operasi berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota se Indonesia kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, sehingga hipotesis penelitian ini diterima
7. Arus Kas Investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota se Indonesia kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, maka hipotesis penelitian ini ditolak
8. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada kelompok pemerintah kabupaten /kota se Indonesia kelompok kemampuan keuangan daerah sedang, sehingga hipotesis 8 penelitian ini ditolak

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba memberikan saran yang dapat berguna dan bermanfaat bagi Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memanfaatkan SiLPA APBD untuk membiayai belanja modal yang lebih produktif dan bermanfaat untuk menambah nilai investasi daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu mencari sumber pendanaan lain guna membiayai belanja daerah dengan mempertimbangkan aspek kemampuan keuangan daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim,2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2007Tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional
- _____,2014. Pembentukan Daerah_daerah Otonom di Indonesia Sampai dengan Tahun 2014. Dirjen Otonomi daerah Kemendagri
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bastian, Indra.2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Erlangga. Jakarta
- Ghozali, Imam.2005. Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Haryanto, 2013. Pengaruh Informasi SiLPA APBD dan Arus Kas Terhadap Penganggaran Belanja Modal Berdasarkan Klasifikasi Pemerintah Daerah Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2007. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang
- Latan,H.,Ghozali, Imam. 2012. Partial Least Square: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Smart PLS2.0.M3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.Semarang
- Muammar,Fauzi.2014.Pengaruh Informasi SiLPA APBD dan Arus Kas Terhadap Penganggaran Belanja Modal Berdasarkan Klasifikasi Pemerintah Kabupaten di Indonesia berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007. Universitas Diponegoro Semarang
- Noordiawan, Deddi,Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati.2007. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta
- Reeve,Warren, Duchac.2012. Principles of Accounting : International Edition United States : South-Western,Cengage Learning
- Siregar, Baldric.2015. Akuntansi Sektor Publik: UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Sularso, Havid, Yanuar E Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Metode Riset Akuntansi Vol.1 No.2 Agustus 2011